

BAB III

PERSPEKTIF AMERIKA SERIKAT TERHADAP VENEZUELA

Bab ini berupaya untuk menjelaskan perspektif Amerika Serikat terhadap Venezuela. Sehingga, dapat diketahui alasan Amerika Serikat masih menganggap Venezuela sebagai ancaman yang akan dijelaskan pada bab IV. Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana pandangan AS terhadap Venezuela. Perspektif Amerika Serikat terhadap Venezuela merupakan bagian yang penting untuk diketahui dalam pembahasan ini. Perspektif sebuah negara terhadap negara lain tercermin dari perlakuannya terhadap negara lain. Sehingga, politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Venezuela akan menggambarkan bagaimana AS memandang Venezuela.

Amerika Serikat telah membuka hubungan diplomatik dengan Venezuela semenjak tahun 1835. Namun, hubungan kedua negara mulai berada pada tensi yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dikarenakan kebijakan Venezuela di era Hugo Chavez dan Nicolas Maduro bertentangan dengan Amerika Serikat. Penyebab tensi tinggi hubungan tersebut dijelaskan di halaman web resmi Amerika Serikat yang menyatakan,

*“the late Hugo Chavez (1999-2013) and Nicolas Maduro (inaugurated April 19, 2013), have largely defined themselves through their opposition to the United States, regularly criticizing the U.S. Government, its policies, and its relations with Latin America”.*⁴⁴

⁴⁴U.S. Relations with Venezuela, <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35766.htm>, diakses pada 22 November 2015

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa telah ada kecenderungan atau indikasi bahwa AS terganggu oleh Venezuela dalam hubungan bilateral kedua negara semenjak Hugo Chavez menjabat. Dibuktikan dengan renggangnya hubungan kedua negara pada masa tersebut. Dengan demikian, pembahasan mengenai perspektif Amerika Serikat mengenai Venezuela sebagai ancaman akan dimulai dari masa pemerintahan Hugo Chavez hingga Nicolas Maduro. Bab III ini akan menjelaskan perspektif AS terhadap Venezuela dalam tiga aspek yaitu *counternarcotics*, terorisme dan perlombaan senjata, dan HAM.

A. *Counternarcotics*

Masalah narkoba merupakan salah satu masalah yang menjadi fokus penting Amerika Serikat dalam politiknya mengatasi kejahatan. Pada awal 1980an, rasio kematian karena pembunuhan di Amerika Serikat mencapai 76 kasus per 100.000 orang penduduk. Kejahatan tersebut terjadi sebagian besar dikarenakan obat-obatan.⁴⁵ Semenjak itu, perdagangan obat-obatan dan minuman keras ilegal, mulai menjadi masalah penting perhatian pemerintah Amerika Serikat. Karenanya, AS juga menerapkan kebijakan yang serupa terhadap politik luar negerinya.

AS mengupayakan pemberantasan narkoba ke negara-negara lain. Berdasarkan U.S. National Drug Control Strategy and International Narcotics Control Strategy Report (INCSR), beberapa kerja sama telah dijalankan untuk mengatasi narkoba yaitu: (1)*Mérida Initiative and Strategy in Mexico*; (2)*Central American Citizen Security Partnership*; (3)*Caribbean Basin*

⁴⁵Thobaben, Robert G. 2002. *Issues in American Political Life Money, Violence, and Biology*, Pearson Education inc, New Jersey, hal.96

*Security Initiative (CBSI); (4)U.S.-Colombia Strategic Development Initiative (CSDI); (5)U.S.Counternarcotics Strategy for Afghanistan; and (6)West Africa Cooperative Security Initiative (WACSI).*⁴⁶ Tujuan dari kerjasama tersebut ialah untuk mengurangi produksi narkoba dari sumbernya, melawan jalur pengedaran narkoba, membongkar jaringan narkoba internasional, mengurangi permintaan obat dan pencegahan ke luar negeri dan menciptakan insentif bagi kerjasama internasional dalam mengontrol narkoba.⁴⁷

Hubungan AS dengan Venezuela dalam mengatasi narkotika, telah terapkan dalam *Memorandum of Understanding on counternarcotics cooperation* semenjak 1978. Dalam hubungannya dengan Venezuela, sejak 1996 AS menganggap Venezuela sebagai jalur transit utama perdagangan obat-obatan di belahan bumi bagian barat. Terutama dalam jalur peredaran narkoba ke Kolombia.⁴⁸ Demi mengatasi peredaran narkoba di Kolombia, AS mengajak Venezuela untuk melakukan kerjasama dalam menangani hal tersebut. Awalnya kerjasama tersebut berlangsung baik dalam rentang 2002-2005. Namun, setelah itu intensitas kerjasama kedua negara menurun. Pemerintah AS berupaya untuk melanjutkan kerjasama, namun Venezuela menahan diri untuk mendukung kerjasama pemberantasan narkoba di tersebut. Menurunnya kerjasama tersebut dapat dilihat dari data yang dipublikasikan Government Accountability Office (GAO) seperti di bawah ini:⁴⁹

⁴⁶Rosen, Liana W.2015.*International Drug Control Policy: Background and U.S. Responses*, Congressional Research Service

⁴⁷ibid

⁴⁸United States Government Accountability Office, *U.S. Counternarcotics Cooperations with Venezuela Has Declined*, 20 Juli 2009

⁴⁹Ibid

Gambar 3.1

AS mendukung aktivitas melawan narkoba di Venezuela

Activity	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Prosecutor's Drug Task Force	●	●	●	●				
Wire intercept	●	●	●	●				
Cooperating Nation Information Exchange System	●	●	●					
JIATF-South Intelligence liaison	●	●	●	●	●			
Port security programs	●	●	●	●	●			
Operation Seis Fronteras	●	●	●	●				
Canine drug detection program	●	●	●	●	●			
Law enforcement training	●	●	●		●	●	●	
Demand reduction programs	●	●	●	●	●	●	●	●
Municipal programs ^a					●	●	●	●

● menunjukkan adanya aktivitas yang sedang berlangsung

Sumber: Analisis GAO

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa pada rentang waktu 2002-2005, AS masih secara intensif melakukan aktivitas melawan narkoba di Venezuela. Semisal dalam *Port Security Program*, AS mendukung peningkatan keamanan di bandara, pelabuhan, dan perbatasan darat di Venezuela melalui pengadaan mesin x-ray dan mesin pendeteksi ion untuk mencegah peredaran narkoba.⁵⁰ Namun, kerjasama serupa menurun semenjak tahun 2006.

Menurunnya kerjasama di bidang tersebut, dikarenakan Presiden Hugo Chavez menuduh agen *Drug Enforcement Administration* (DEA) yang ada di Venezuela sebagai mata-mata Amerika Serikat pada Juli 2005. Dan juga meminta agen-agen DEA yang berada di Venezuela untuk meninggalkan

⁵⁰Ibid

negaranya. Imbas dari hal tersebut ialah, Venezuela tidak akan melanjutkan kerja sama melawan narkoba lebih lanjut dengan Amerika Serikat hingga kedua negara menegosiasikan dan menyepakati adendum dari 1978 *Memorandum of Understanding*.

Amerika Serikat tentunya tidak terima dengan tuduhan tersebut. AS berusaha menegosiasikan masalah tersebut dengan Venezuela, namun selalu gagal. Ketika negosiasi tidak berjalan mulus, demi mengubah pendirian pemerintah Venezuela, AS mengeluarkan laporan yang menunjukkan negara-negara yang tidak memenuhi standar internasional tertentu yang mengatur perdagangan narkoba, dukungan untuk terorisme, dan tidak memperhatikan hak asasi manusia.⁵¹ Dan dalam *Country Reports on Terrorism* yang dipublikasikan pada April 2006, Venezuela termasuk negara yang tidak memenuhi standar tersebut. Bersamaan dengan laporan tersebut, AS juga memberlakukan sanksi yaitu embargo senjata dan peralatan militer lainnya kepada Venezuela.⁵²

Melanjutkan upaya serupa, Dalam ketetapan presiden yang dipublikasikan pada 14 September 2006, Presiden Bush menyatakan

*"I hereby designate Bolivia, Burma, and Venezuela as countries that have failed demonstrably during the previous 12 months to adhere to their obligations under international counternarcotics agreements...."*⁵³

⁵¹ibid

⁵²Dominguez, Jorge I;De Castro, rafael fernandez.2010. *Contemporary U.S.-latin American relations*, Routledge, New York, hal.221

⁵³ The White House, *Presidential Determination on Major Drug Transit or Major Illicit Drug Producing Countries for Fiscal Year 2016*, 14 September 2015

Dalam pernyataan tersebut, Bush menjelaskan bahwa Venezuela beserta negara lainnya tidak mampu menepati kesepakatan internasional untuk melawan narkoba. Sehingga, dari berbagai pemaparan serta pernyataan pemerintah AS di atas, telah dapat menjelaskan bahwa AS menganggap Venezuela sebagai negara yang tidak bekerja sama dalam melawan narkoba.

B. Terorisme dan Perlombaan Senjata

Global War on Terrorism merupakan kampanye militer AS pasca aksi terorisme di New York City dan Washington, D.C oleh Al-Qaeda. Presiden Bush pertama kali mendeklarasikan kampanye ini pada 20 September 2001. Semenjak kejadian tersebut, *war on terrorism* telah menjadi instrumen bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat.⁵⁴

Venezuela pada awalnya tidak menjadi perhatian AS dalam mengatasi terorisme. Hubungan AS dan Venezuela berfokus pada kerjasama melawan narkoba seperti yang dipaparkan sebelumnya. Namun dalam upaya melawan narkoba, AS menemukan indikasi dan menganggap Venezuela melindungi terorisme dengan memfasilitasi FARC (*Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia*). FARC merupakan gerakan gerilya berideologi sosialis yang menentang pemerintahan demokrasi di Kolombia.⁵⁵ Sejak 1999, Chavez telah dekat dengan kelompok bersenjata ini. Dukungan Venezuela terhadap FARC salah satunya dapat dilihat pada Januari 2008, Chavez melindungi FARC dengan mengkampanyekan pengakuan FARC sebagai *belligerent group*

⁵⁴Thobaben, Robert G, op. cit, hal.123

⁵⁵Council of Foreign Relations, *FARC, ELN: Colombia's Left Wing Guerrillas*, <http://www.cfr.org/colombia/farc-eln-colombias-left-wing-guerrillas/p9272>, diakses pada 22 November 2015

daripada kelompok teroris. Chavez meyakini bahwa FARC telah memenuhi syarat sebagai *belligerent group* dengan menyatakan bahwa FARC merupakan "*genuine armies occupying territory and fighting for the Bolivarian cause.*".

AS memandang Venezuela telah jelas mendukung keberadaan FARC. Pada Agustus 2005, Juru bicara departemen luar negeri Amerika Serikat Tom Casey menyatakan "*Venezuelan territory is a safe haven for Colombian terrorists.*"⁵⁶. Selanjutnya pada Juni 2006 dalam laporan tahunan mengenai terorisme, Departemen of State Amerika Serikat menyatakan "*Venezuela's cooperation in the international campaign against terrorism continues to be insignificant...It's not clear to what point the Venezuelan government offered material support to Colombian terrorists.*". Dari beberapa pernyataan diatas, AS dengan jelas menyampaikan ketidaksetujuannya akan sikap Venezuela yang memberikan dukungan kepada FARC. Alasan tersebut pula lah yang melatarbelakangi AS memberlakukan sanksi embargo senjata dan peralatan militer lainnya kepada Venezuela, dalam *Country Reports on Terrorism* yang dipublikasikan pada April 2006.⁵⁷

Kemudian, pada 2009 AS mencatat empat negara yaitu Syria, Kuba, Sudan dan Iran sebagai negara yang mendukung terorisme.⁵⁸ Presiden Bush meminta timnya pengacara dan penasihat meninjau kemungkinan menempatkan

⁵⁶Eva Golinger, *US Aggression Againsts Venezuela; Fact, not Fiction*, <http://www.evagolinger.com/#!/US-Aggression-Against-Venezuela-Fact-Not-Fiction/c1f3y/2FC868CE-AF4A-48F3-8440-9E649076C0CD>, diakses pada 22 November 2015

⁵⁷Dominguez, Jorge I;De Castro, rafael fernandez , Loc. Cit.

⁵⁸Ray Walser, *State Sponsor of Terrorism: Time to add Venezuela to The List*, <http://www.heritage.org/research/reports/2010/01/state-sponsors-of-terrorism-time-to-add-venezuela-to-the-list>, diakses pada 23 November 2015

Venezuela dalam daftar tersebut.⁵⁹ Venezuela akan dimasukkan dalam daftar nomer lima, karena dukungannya terhadap aktivitas terorisme yang dilakukan FARC serta kedekatan Venezuela dengan keempat negara-negara sponsor terorisme di atas, terkhusus Iran dan Kuba. Terkait kedekatan Venezuela terhadap Kuba dan Iran. Presiden Barrack Obama menyatakan prihatin terhadap hubungan yang mengancam demokrasi di negara tersebut.⁶⁰

Iran dan Kuba sejatinya merupakan oposisi bagi imperialisme Amerika Serikat, sama halnya dengan Venezuela. Amerika Serikat menganggap kedua negara ini memiliki kapabilitas senjata nuklir yang mampu membahayakan keamanan dunia. Sehingga ketika Venezuela memiliki kedekatan terhadap dua negara tersebut, Amerika Serikat memiliki pandangan bahwa Venezuela tidak mendukung upaya menangani perlombaan senjata. Maka dari itu pada 24 Mei 2011, AS memberikan sanksi kepada tujuh perusahaan internasional karena dukungannya kepada sektor energi Iran. Hal tersebut berdasarkan *Iran Sanction Act* (ISA) of 1996. Dari ketujuh perusahaan tersebut, PDVSA perusahaan minyak milik pemerintah Venezuela ikut terkena sanksi.⁶¹ Sanksi yang berlaku ialah melarang PDVSA untuk bersaing dengan pemerintah AS dalam mendapatkan kontrak, mengamankan pembiayaan dari bank ekspor-impor AS, serta mendapatkan izin ekspor dari AS.⁶² Sanksi tersebut, dinilai

⁵⁹Eve golinger, loc. cit.

⁶⁰Tempo, *Obama Kritik hubungan AS dengan Iran dan Kuba*, <http://dunia.tempo.co/read/news/2011/12/20/116372690/obama-kritik-hubungan-venezuela-dengan-iran-dan-kuba>, diakses pada 23 November 2015

⁶¹US. *Departement of State, Seven Companies Sanctioned Under Amandede Iran Sanction Act*, <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/05/164132.htm>, diakses pada 23 November 2015

⁶²ibid

simbolik karena tidak membatasi penjualan minyak Venezuela ke AS dan ke pasar global.⁶³

C. Hak Asasi Manusia

Seperti dijelaskan sebelumnya, AS masih menganggap Venezuela sebagai negara yang tidak mendukung AS dalam melawan narkoba, terorisme dan perlombaan senjata. Perspektif tersebut masih terus bertahan pada masa pemerintahan Chavez ataupun Nicolas Maduro. Hal ini dikarenakan kepemimpinan Nicolas Maduro yang tidak beda jauh arah pemikirannya dengan pendahulunya. Namun pada pemerintahan Maduro, AS lebih mempersoalkan masalah HAM di Venezuela diiringi dengan masalah-masalah sebelumnya.

Setelah Hugo Chavez meninggal, Presiden Obama menyampaikan pernyataan:

*“At this challenging time of President Hugo Chavez’s passing, the United States reaffirms its support for the Venezuelan people and its interest in developing a constructive relationship with the Venezuelan government. As Venezuela begins a new chapter in its history, the United States remains committed to policies that promote democratic principles, the rule of law, and respect for human rights.”*⁶⁴

Dalam pernyataan tersebut, Presiden Obama menyatakan bahwa ada tiga hal penting yang diharapkan tercapai di Venezuela nantinya dengan kepemimpinan baru, yaitu prinsip demokrasi, penegakan hukum, dan masalah HAM.

⁶³ *U.S sanctions Venezuelan Oil Giant for Iran Trade*, <http://www.reuters.com/article/2011/05/25/us-iran-usa-sanctions-idUSTRE74N47R20110525#KqCMRVVvUze3Qk> B6.97, diakses pada 24 November 2015

⁶⁴ The White House, Office of the Press Secretary, Statement of President Obama on the Death of Venezuelan President Hugo Chávez, 5 Maret 2013.

Meskipun demikian, masalah HAM dan penegakan hukum lah yang menjadi masalah utama yang akhirnya terjadi di Venezuela era Nicolas Maduro. Penanganan terhadap demonstrasi menuntut turunnya pemerintahan Nicolas Maduro pecah pada 14 Februari 2014, dianggap oleh AS sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap HAM. Karena dari demonstrasi tersebut, didapati 36 korban jiwa baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak pendemo. Serta, lebih dari 2.326 orang ditahan oleh pemerintah.⁶⁵ Pada perjalanannya ke Meksiko pada 19 Februari 2014, President Obama mengkritik perlakuan dan penanganan Pemerintah Venezuela terhadap demonstran dan meminta masalah tersebut diselesaikan dengan terlibat dalam dialog yang nyata.⁶⁶

Kekecewaan AS terhadap penanganan pemerintah Venezuela terhadap demonstran lebih lanjut disampaikan sekretaris negara John Kerry yang meminta pemerintah Venezuela untuk kembali menghormati HAM. Ia menyatakan bahwa pemerintah Venezuela telah memprovokasi demonstrasi yang damai dengan kekerasan. Hal tersebut dilihat dengan melibatkan kelompok bersenjata yang menyatakan mendukung pemerintah pada demonstrasi tersebut. Lebih lanjut, Kerry menyampaikan semua pihak, termasuk para pemrotes oposisi, "harus menahan diri dari kekerasan," ia juga menyatakan bahwa "penggunaan kekuasaan pemerintah dan intimidasi peradilan terhadap warga dan tokoh politik tidak dapat diterima dan hanya

⁶⁵Garcia, Armando, *op. cit.*, hal.56

⁶⁶The White House, Press Conference by President Obama, President Peña Nieto, and Prime Minister Harper, Toluca, Mexico, 19 Februari 2014

akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan"⁶⁷. Dari pernyataan tersebut, pemerintah AS memandang bahwa pemerintah Venezuela telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan HAM dalam menangani demonstran. Hal itu dikarenakan penggunaan kekerasan selama penanganan berlangsung, sehingga memakan korban jiwa.

Masih dalam masalah yang sama, pada 8 Maret 2015, Amerika Serikat menetapkan Venezuela sebagai ancaman keamanan nasional AS. Presiden Amerika Serikat Barack Obama menandatangani *executive order* 13692 yang mendeklarasikan Venezuela sebagai ancaman keamanan AS. Di bawah ini merupakan kutipan dari *executive order* 13692:

"BARACK OBAMA, President of the United States of America, find that the situation in Venezuela, including the Government of Venezuela's erosion of human rights guarantees, persecution of political opponents, curtailment of press freedoms, use of violence and human rights violations and abuses in response to antigovernment protests, and arbitrary arrest and detention of antigovernment protestors, as well as the exacerbating presence of significant public corruption, constitutes an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States, and I hereby declare a national emergency to deal with that threat".⁶⁸

Seiring dengan hal tersebut, AS juga menetapkan sanksi kepada tujuh pejabat Venezuela. Sanksi berupa pembekuan aset milik ketujuh pejabat itu dan melarang warga Amerika Serikat berbisnis dengan mereka. Ketujuh pejabat tersebut ialah Antonio José Benavides Torres, Gustavo Enrique González López, Justo José Noguera Pietri, Katherine Nayarith Harington

⁶⁷U.S. Department of State, Secretary of State John Kerry, *Situation in Venezuela*, 21 Februari 2014

⁶⁸The White House, *Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing The situation in Venezuela*, 8 Maret 2015

Padron, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, Manuel Gregorio Bernal Martínez, dan Miguel Alcides Vivas Landino. Sejatinya, *executive order* tersebut ditujukan untuk memblokir properti dan menanggukkan masuknya orang-orang yang disebutkan diatas karena kontribusinya terhadap terhadap situasi pelanggaran HAM di Venezuela.

Dari pemaparan sebelumnya, dapat dilihat bahwa pandangan AS terhadap Pemerintahan Venezuela tidak mampu menangani masalah rakyat di dalam negerinya. Sehingga penggunaan kekerasan menjadi cara yang diambil Pemerintah Venezuela. Dengan begitu, AS menganggap Venezuela tidak sejalan dengan penegakan HAM karena perlakuan pemerintah terhadap demonstran pada 14 Februari 2014. Hal ini dianggap oleh AS sebagai tindakan pembatasan kebebasan berpendapat oleh pemerintah Venezuela

Pemaparan pada BAB III ini menjelaskan Venezuela dengan pendiriannya mengenai kebijakan luar negeri AS yang bersebrangan dianggap sebagai bahaya oleh AS. Venezuela tidak sepaham dengan AS dalam upaya AS mengatasi narkoba, terorisme dan perlombaan senjata serta HAM. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku Venezuela yang enggan untuk bekerjasama dengan AS dalam aspek tersebut. Maka dari itu, AS selalu menerapkan politik luar negeri yang hampir serupa menangani masalah di Venezuela. Dan dalam masalah di aspek tersebut, AS selalu memberikan sanksi kepada Venezuela.